ICHES: International Conference on Humanity Education and Social

KAMPUNG NU SEBAGAI ARENA KUASA: PEMBERDAYAAN DAN OTORITAS LOKAL DI DESA BENELAN LOR KECAMATAN KABAT-BANYYUWANGI

MUHAMMAD SAHLAN
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB)
Email: sahlansaja52@gmail.com

Abstract

This study analyzes Kampung NU as an arena of power by examining the interplay between community empowerment and local authority in Benelan Lor Village. Kampung NU has emerged as a community-based religious initiative that intersects with village governance, religious identity, and grassroots participation. The objective of this research is to explore how Kampung NU operates not only as a mechanism for social empowerment but also as a space where power relations among village officials, Nahdlatul Ulama (NU) grassroots elites, and local communities are constructed and negotiated. This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, document analysis, and supported by preliminary survey data. The findings indicate that Kampung NU performs a dual function: strengthening religious identity and social cohesion while simultaneously serving as an instrument of symbolic and structural power for local elites. Empowerment narratives are predominantly framed through dominant religious discourse, influencing participation patterns and authority distribution at the village level. The study concludes that Kampung NU represents a dialectical space where empowerment and power coexist, revealing the complexity of religion-based community development in rural Indonesia.

Keywords: **Kampung NU; Power Relations; Community Empowerment; Local Authority**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Kampung NU sebagai arena kuasa dengan menyoroti relasi antara pemberdayaan masyarakat dan otoritas lokal di Desa Benelan Lor. Kampung NU berkembang sebagai inisiatif keagamaan berbasis komunitas yang beririsan dengan tata kelola desa, identitas keagamaan, dan partisipasi warga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Kampung NU tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial, tetapi juga sebagai ruang pembentukan dan negosiasi relasi kuasa antara pemerintah desa, elit akar rumput Nahdlatul Ulama (NU), dan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, serta didukung oleh data survei awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung NU memiliki fungsi ganda, yaitu memperkuat identitas keagamaan dan kohesi sosial, sekaligus menjadi instrumen kuasa simbolik dan struktural bagi aktor-aktor lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kampung NU merupakan ruang dialektis antara pemberdayaan dan kuasa dalam praktik pembangunan berbasis agama di pedesaan.

Kata Kunci: **Kampung NU; Relasi Kuasa; Pemberdayaan Masyarakat; Otoritas Lokal**

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, kajian tentang relasi agama dan kekuasaan mengalami pergeseran signifikan, dari sekadar melihat agama sebagai sistem nilai normatif menuju pemahaman agama sebagai aktor sosial yang aktif dalam arena politik, ekonomi, dan kebudayaan. Agama tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber moralitas publik, melainkan juga sebagai kekuatan simbolik yang mampu membentuk legitimasi, mengatur kepatuhan sosial, dan memengaruhi distribusi otoritas di tingkat lokal maupun nasional (Casanova, 2011; Fox, 2018). Dalam konteks ini, organisasi keagamaan sering kali berperan sebagai mediator antara negara dan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Narasi pemberdayaan masyarakat berbasis agama kerap dipromosikan sebagai solusi atas keterbatasan negara dalam menjangkau kebutuhan sosial warga. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan tidak selalu bersifat emansipatoris. Sebaliknya, ia dapat berkelindan dengan mekanisme kontrol sosial dan reproduksi relasi kuasa baru (Li, 2007; Cornwall & Brock, 2005). Dengan demikian, pemberdayaan perlu dipahami secara kritis sebagai proses yang sarat kepentingan, bukan sekadar agenda teknokratis atau moral.

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar memiliki peran historis dan kultural yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Sejumlah studi menegaskan bahwa NU tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memengaruhi tata kelola desa, pembentukan identitas kolektif, dan arah kebijakan lokal (Bush, 2009; Fealy & White, 2008). Kehadiran NU di desa sering kali dilembagakan melalui berbagai simbol, program, dan ruang sosial yang menandai dominasi identitas keagamaan tertentu.

Salah satu bentuk artikulasi peran NU di Banyuwangi adalah munculnya konsep *Kampung NU*, yang secara normatif dipromosikan sebagai ruang pemberdayaan umat, penguatan nilai Aswaja, dan penguatan kohesi sosial warga. Meski demikian, kajian akademik tentang Kampung NU masih relatif terbatas dan cenderung deskriptif-normatif, menekankan keberhasilan program tanpa mengulas dinamika kekuasaan yang menyertainya (Hidayat, 2020; Munir, 2021). Padahal, penandaan ruang sosial sebagai "Kampung NU" mengandung implikasi politis dan simbolik yang tidak sederhana.

Dalam perspektif teori sosial, praktik semacam Kampung NU dapat dipahami sebagai *arena kuasa* (field) sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, yakni ruang sosial tempat aktor-aktor dengan berbagai modal (simbolik, sosial, kultural, dan politik) saling berkompetisi untuk memperoleh legitimasi dan dominasi (Bourdieu, 1991). Pada arena ini, simbol keagamaan tidak netral, melainkan menjadi instrumen produksi dan reproduksi kuasa yang dilegitimasi secara kultural.

Desa Benelan Lor, Kabupaten Banyuwangi, merupakan contoh konkret bagaimana Kampung NU dilembagakan dalam ruang sosial desa. Berdasarkan penelitian terdahulu, pembentukan Kampung NU di desa ini tidak terlepas dari relasi antara pemerintah desa dan pengurus Ranting NU yang saling bernegosiasi dalam menentukan arah kebijakan dan simbol identitas desa

(Musafak, 2025). Kampung NU di Benelan Lor tidak hanya hadir sebagai program keagamaan, tetapi juga sebagai penanda otoritas sosial yang memengaruhi struktur relasi antarwarga.

Berdasarkan survei awal dan wawancara pendahuluan dengan tokoh masyarakat dan aparatur desa Benelan Lor (2024–2025), Kampung NU dipersepsikan secara beragam. Sebagian warga melihatnya sebagai ruang konsolidasi sosial dan keagamaan, sementara sebagian lain memandangnya sebagai simbol dominasi kelompok tertentu dalam ruang publik desa. Temuan awal ini menunjukkan bahwa Kampung NU beroperasi sebagai ruang inklusi sekaligus eksklusi sosial, tergantung pada posisi aktor dalam struktur kekuasaan lokal.

Sejauh ini, penelitian tentang NU di tingkat desa lebih banyak menyoroti peran kultural dan pendidikan keagamaan (Azra, 2012; Turmudi, 2006), atau relasi politik NU dalam skala nasional dan regional. Penelitian yang secara spesifik menempatkan Kampung NU sebagai arena kuasa yang mempertemukan pemberdayaan dan otoritas lokal masih sangat terbatas. Dengan demikian, studi ini mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan menggeser fokus dari "apa yang dilakukan Kampung NU" menuju "bagaimana kuasa diproduksi dan dinegosiasikan melalui Kampung NU".

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif, studi ini menawarkan perspektif kritis dengan memosisikan Kampung NU sebagai arena kuasa sosial. Penelitian ini tidak hanya membahas program dan struktur organisasi, tetapi juga menelaah praktik simbolik, relasi aktor, serta dampak sosial dari pelembagaan identitas keagamaan di tingkat desa. Dengan pendekatan ini, Kampung NU dipahami bukan sekadar sebagai instrumen dakwah atau pemberdayaan, melainkan sebagai mekanisme produksi legitimasi dan otoritas lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana Kampung NU di Desa Benelan Lor berfungsi sebagai arena kuasa yang mempertemukan praktik pemberdayaan dan pembentukan otoritas lokal, serta bagaimana legitimasi sosial diproduksi melalui praktik sosial-keagamaan yang dilembagakan?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kampung NU sebagai arena kuasa yang mempertemukan praktik pemberdayaan masyarakat dan pembentukan otoritas lokal di Desa Benelan Lor. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian tentang relasi agama dan kekuasaan di tingkat lokal, sementara secara praktis dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah desa dan organisasi keagamaan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, praktik, dan relasi kuasa yang bekerja dalam pembentukan dan pelaksanaan Kampung NU di tingkat desa. Studi kasus dipandang relevan karena Kampung NU di Desa Benelan Lor merupakan fenomena sosial yang kontekstual, spesifik, dan tidak dapat dilepaskan dari

dinamika aktor, sejarah lokal, serta struktur kekuasaan desa. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap realitas sosial secara holistik, bukan mengukurnya secara kuantitatif.

Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada paradigma interpretatif-kritis, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial yang sarat kepentingan dan relasi kuasa. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan praktik Kampung NU, tetapi juga mengungkap bagaimana praktik tersebut mereproduksi atau menegosiasikan otoritas lokal di Desa Benelan Lor.

Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian adalah **Desa Benelan Lor, kecamatan kabat, Kabupaten Banyuwangi**, yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Kampung NU. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merepresentasikan praktik konkret pelembagaan identitas keagamaan NU dalam ruang sosial desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan Kampung NU. Informan utama meliputi: (1) aparatur pemerintah desa, (2) pengurus Ranting NU, (3) tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta (4) warga desa dengan latar belakang sosial yang beragam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, dan posisi sosial informan dalam arena Kampung NU.

Data sekunder meliputi dokumen resmi desa (peraturan desa, notulen musyawarah desa, monografi desa), dokumen organisasi NU di tingkat ranting, arsip kegiatan Kampung NU, serta literatur akademik yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks historis serta struktural terhadap data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis sekaligus fleksibel dalam menggali pengalaman dan pandangan informan. Wawancara difokuskan pada persepsi informan tentang makna Kampung NU, proses pembentukannya, relasi antara NU dan pemerintah desa, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Observasi dilakukan secara partisipatif terbatas, dengan mengamati aktivitas keagamaan, pertemuan warga, dan simbol-simbol Kampung NU yang hadir dalam ruang publik desa. Observasi ini bertujuan untuk menangkap praktik sosial dan simbolik yang tidak selalu terungkap dalam wawancara. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis serta visual yang berkaitan dengan Kampung NU, guna melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.

Teknik dan Alat Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pengkodean, dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama, seperti pemberdayaan, legitimasi, simbol keagamaan, dan otoritas lokal. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi analitis dan matriks tematik yang memudahkan pemahaman pola relasi antaraktor.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan berulang, dengan terus membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya konsep *arena kuasa* dan modal simbolik. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan kedalaman analisis yang memadai untuk menjelaskan Kampung NU sebagai arena kuasa dalam konteks Desa Benelan Lor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Benelan Lor merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang secara sosial-kultural didominasi oleh komunitas Muslim dengan afiliasi kuat terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Struktur sosial desa ditandai oleh keberadaan lembaga keagamaan seperti masjid, mushala, majelis taklim, dan kegiatan rutin keagamaan berbasis tradisi Aswaja. Sejak dideklarasikannya Desa Benelan Lor sebagai Kampung NU, ruang sosial desa mengalami transformasi simbolik melalui pemasangan atribut, narasi keagamaan, serta integrasi program desa dengan agenda organisasi NU.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Kampung NU tidak hanya hadir sebagai label administratif atau simbolik, melainkan menjadi kerangka rujukan dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari kegiatan keagamaan, musyawarah desa, hingga program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Benelan Lor sebagai arena yang relevan untuk mengkaji relasi kuasa antara organisasi keagamaan dan otoritas lokal.

3.2 Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik Kampung NU. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan posisi sosial dan keterlibatan dalam arena Kampung NU.

Tabel 3.1
Karakteristik Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Keterangan
1	Aparatur Pemerintah Desa	4	Kepala desa, sekretaris desa, perangkat
2	Pengurus Ranting NU	5	Ketua, sekretaris, dan pengurus
3	Tokoh Agama & Masyarakat	4	Kiai, imam masjid, tokoh informal

4	Warga Desa	7	Latar belakang sosial beragam
	Total	**20**	

Karakteristik informan menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup berbagai perspektif, baik dari aktor formal maupun informal, sehingga memungkinkan analisis relasi kuasa yang lebih komprehensif. Warga desa yang diwawancarai terdiri dari kelompok yang aktif dalam kegiatan NU dan kelompok yang tidak terlibat langsung, guna menangkap dinamika inklusi dan eksklusi sosial.

3.3 Kampung NU sebagai Arena Produksi Kuasa Simbolik

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Kampung NU di Desa Benelan Lor berfungsi sebagai arena produksi kuasa simbolik. Simbol-simbol NU seperti bendera, baliho, dan narasi Aswaja tidak hanya berfungsi sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai penanda legitimasi sosial. Aparatur desa dan pengurus NU secara bersama-sama memproduksi narasi bahwa Kampung NU merupakan representasi "nilai keislaman warga desa".

Seorang perangkat desa menyatakan:

"Kampung NU ini kan mencerminkan mayoritas warga. Jadi kalau desa membawa nama NU, itu justru memperkuat jati diri desa."

3.4 Kampung NU sebagai Arena Produksi Kuasa Simbolik

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Kampung NU di Desa Benelan Lor berfungsi sebagai arena produksi kuasa simbolik. Simbol-simbol NU seperti bendera, baliho, dan narasi Aswaja tidak hanya berfungsi sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai penanda legitimasi sosial yang dilekatkan pada otoritas desa.

Seorang perangkat desa menjelaskan:

"Kampung NU ini kan mencerminkan mayoritas warga. Jadi kalau desa membawa nama NU, itu justru memperkuat jati diri desa."

Sementara itu, pengurus Ranting NU menegaskan makna simbolik Kampung NU sebagai representasi nilai kolektif:

"Kalau sudah disebut Kampung NU, orang otomatis paham nilai apa yang dipakai di desa ini. Itu bukan cuma nama, tapi identitas."

Tokoh agama setempat juga mengakui bahwa simbol NU memiliki daya pengaruh dalam membentuk kepatuhan sosial:

"Warga itu lebih manut kalau dibungkus NU. Kalau sudah pakai nama NU, jarang yang berani menolak secara terbuka."

Petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa simbol keagamaan NU berfungsi sebagai modal simbolik yang diakui secara luas dan dikonversi menjadi otoritas sosial. Dalam kerangka

Bourdieu, pengakuan kolektif ini memperkuat dominasi simbolik aktor-aktor yang berada dalam jejaring NU.

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana identitas keagamaan diposisikan sebagai identitas kolektif desa, sehingga memperoleh legitimasi struktural. Dalam kerangka Bourdieu, praktik ini menunjukkan akumulasi **modal simbolik** yang dikonversi menjadi otoritas sosial.

3.5 Pemberdayaan sebagai Mekanisme Legitimasi Otoritas

Secara empiris, Kampung NU di Benelan Lor juga menjadi pintu masuk bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keagamaan, penguatan ekonomi umat, dan kegiatan sosial berbasis jamaah. Data dokumentasi desa menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pemberdayaan dilekatkan secara naratif dengan identitas Kampung NU, meskipun sumber pendanaannya berasal dari anggaran desa.

Namun demikian, hasil wawancara dengan warga menunjukkan adanya persepsi yang beragam. Sebagian warga memandang program tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa program Kampung NU lebih banyak menyasar kelompok tertentu yang memiliki kedekatan struktural dengan NU.

Seorang warga menyampaikan:

"*Kalau ikut bebebagai kegiatan NU, ya lebih gampang diajak program. Kalau tidak, ya kadang merasa cuma jadi penonton*."

Sebaliknya, warga yang tidak terlibat langsung dalam struktur NU mengungkapkan pengalaman berbeda:

"Programnya katanya untuk semua, tapi yang sering diajak ya orang-orang NU. Kalau kita tidak ikut, ya kadang cuma dengar dari belakang."

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan tokoh masyarakat:

"Secara tidak langsung, pemberdayaan itu jadi seleksi. Yang dekat NU lebih mudah masuk kegiatan desa."

Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak bersifat netral, melainkan menjadi mekanisme seleksi sosial dan memperkuat legitimasi otoritas lokal yang memperkuat posisi aktor dominan dalam arena Kampung NU. Dan partisipasi dalam program sosial menjadi sarana afirmasi identitas dan kedekatan structural.

3.6 Relasi Pemerintah Desa dan Ranting NU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah desa dan pengurus Ranting NU bersifat **kooperatif sekaligus strategis**. Pemerintah desa memperoleh legitimasi sosial melalui dukungan simbolik NU, sementara NU memperoleh akses terhadap sumber daya dan ruang kebijakan desa.

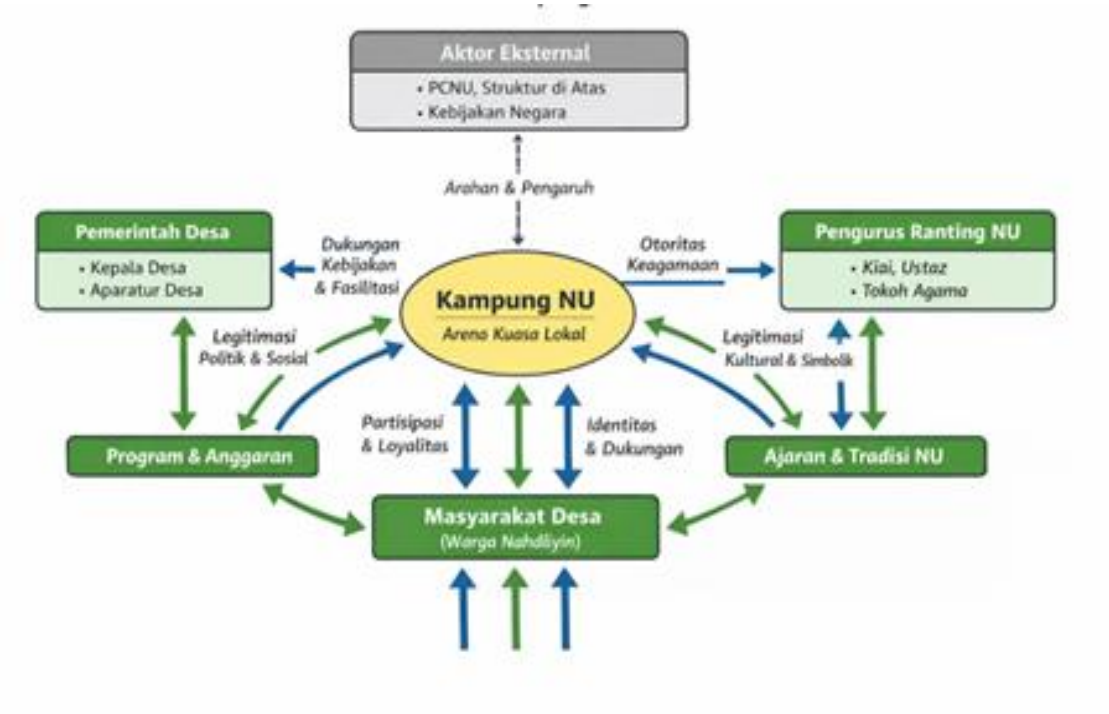
Seorang aparatur desa menyatakan secara terbuka:

"Kalau NU mendukung, desa itu lebih tenang. Warga percaya sama kebijakan desa."

Di sisi lain, pengurus Ranting NU menyadari posisi strategisnya dalam relasi tersebut:

“Kami tidak masuk ke pemerintahan, tapi desa pasti mempertimbangkan NU sebelum ambil keputusan.”

Relasi ini menunjukkan adanya pertukaran modal simbolik dan modal politik, di mana Kampung NU menjadi arena pertemuan kepentingan kedua belah pihak.



Gambar 3.1
Skema Relasi Kuasa Kampung NU di Desa Benelan Lor

Gambar ini menunjukkan hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan Ranting NU, dengan Kampung NU sebagai arena pertemuan kepentingan. Panah dua arah menggambarkan pertukaran modal simbolik (legitimasi keagamaan) dan modal politik (akses kebijakan dan program).

Relasi ini tidak selalu bersifat formal, melainkan berlangsung melalui praktik sehari-hari seperti musyawarah desa, kegiatan keagamaan bersama, dan simbolisasi ruang publik.

3.7 Dampak Sosial: Inklusi dan Eksklusi

Analisis data menunjukkan bahwa Kampung NU menghasilkan dampak sosial yang ambivalen. Di satu sisi, Kampung NU memperkuat solidaritas internal warga yang berafiliasi dengan NU dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Di sisi lain, terdapat potensi eksklusi simbolik terhadap kelompok warga yang tidak secara aktif terlibat dalam struktur NU.

Tabel 3.2 Persepsi Warga terhadap Kampung NU

Persepsi Warga	Kecenderungan
Memperkuat solidaritas	Tinggi
Meningkatkan partisipasi	Sedang
Menimbulkan eksklusi	Ada
Netral/tidak berpengaruh	Rendah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kampung NU diterima secara umum, tetap terdapat ruang kritik dan resistensi laten dalam masyarakat.

3.8 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, Kampung NU di Desa Benelan Lor dapat dipahami sebagai arena kuasa tempat berbagai aktor bernegosiasi dan berkompetisi dalam memproduksi legitimasi sosial. Pemberdayaan masyarakat berfungsi tidak hanya sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai strategi penguatan otoritas lokal. Relasi kuasa yang terbentuk bersifat halus dan simbolik, sehingga sering kali diterima sebagai kewajaran sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa Kampung NU bukan sekadar program keagamaan, melainkan mekanisme sosial-politik yang membentuk struktur kuasa desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kritis terhadap praktik pemberdayaan berbasis identitas keagamaan di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

4.1 Kampung NU sebagai Arena Sosial: Dari Ruang Simbolik ke Ruang Kuasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung NU di Desa Benelan Lor tidak dapat dipahami hanya sebagai ruang kultural atau keagamaan, melainkan sebagai arena sosial yang sarat dengan relasi kuasa. Arena ini bekerja melalui mekanisme simbolik yang tampak natural dalam keseharian masyarakat desa. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, arena (*field*) merupakan ruang relasional tempat aktor dengan kepemilikan modal yang berbeda saling berinteraksi, berkompetisi, dan bernegosiasi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya (Bourdieu, 1991). Kampung NU di Benelan Lor berfungsi sebagai arena semacam itu, di mana simbol keagamaan NU beroperasi sebagai modal simbolik yang memiliki daya legitimasi tinggi.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa simbol keagamaan tidak bersifat netral. Simbol NU—baik dalam bentuk narasi Aswaja, atribut visual, maupun ritus kolektif—menjadi sarana untuk membangun klaim moral atas ruang sosial desa. Klaim ini kemudian diterima secara luas karena berkelindan dengan sejarah panjang NU sebagai representasi Islam tradisional yang dominan di pedesaan Jawa. Dengan demikian, Kampung NU bekerja sebagai arena yang memproduksi "kewajaran sosial" atas dominasi tertentu, sehingga relasi kuasa yang terbentuk cenderung tidak dipertanyakan.

4.2 Produksi Modal Simbolik dan Legitimasi Otoritas Lokal

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bagaimana Kampung NU menjadi medium produksi dan konversi modal simbolik menjadi otoritas sosial dan politik. Modal simbolik, menurut Bourdieu, merupakan bentuk modal yang diakui secara sosial sebagai sah dan bermakna, sehingga mampu menghasilkan kepatuhan tanpa paksaan langsung. Dalam konteks Desa Benelan Lor, legitimasi keagamaan NU dikonversi menjadi legitimasi sosial bagi aktor-aktor yang berafiliasi dengannya, baik pengurus NU maupun aparatur desa.

Relasi ini menjelaskan mengapa pemerintah desa secara aktif merangkul simbol dan struktur NU. Dukungan terhadap Kampung NU bukan semata-mata ekspresi religiusitas, melainkan strategi untuk memperoleh pengakuan moral dari masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan temuan Bush (2009) dan Fealy & White (2008) yang menunjukkan bahwa NU sering menjadi sumber legitimasi penting bagi kekuasaan lokal, terutama di wilayah dengan basis Nahdliyin yang kuat.

Dengan demikian, otoritas lokal di Desa Benelan Lor tidak hanya dibangun melalui mekanisme formal birokrasi desa, tetapi juga melalui penguasaan simbol keagamaan yang diterima sebagai representasi nilai kolektif masyarakat. Otoritas menjadi bersifat ganda: legal-formal dan simbolik-kultural.

4.3 Pemberdayaan sebagai Strategi Kuasa yang Halus

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan dalam Kampung NU tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai upaya emansipatif. Pemberdayaan justru berfungsi sebagai strategi kuasa yang halus (*soft power*), karena bekerja melalui partisipasi, konsensus, dan narasi kepentingan bersama. Li (2007) menyebut praktik semacam ini sebagai *the will to improve*, yakni kehendak untuk "memperbaiki" masyarakat yang sering kali menyamarkan relasi kuasa di balik bahasa pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam Kampung NU, pemberdayaan dilekatkan dengan identitas keagamaan, sehingga partisipasi dalam program sosial sekaligus menjadi mekanisme afirmasi identitas. Warga yang terlibat aktif memperoleh akses sosial dan simbolik yang lebih luas, sementara mereka yang berada di luar jaringan NU cenderung berada pada posisi marginal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bekerja sebagai instrumen diferensiasi sosial, bukan sekadar distribusi manfaat.

Temuan ini memperkuat kritik Cornwall dan Brock (2005) terhadap penggunaan istilah pemberdayaan sebagai frasa yang sedang populer *atau buzzword* pembangunan yang sering kehilangan makna kritisnya. Dalam konteks Benelan Lor, pemberdayaan menjadi sarana legitimasi otoritas lokal, bukan ruang negosiasi yang setara bagi seluruh warga.

4.4 Relasi Simbiotik Pemerintah Desa dan Ranting NU

Pembahasan ini menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah desa dan Ranting NU bersifat simbiotik, bukan subordinatif satu arah. Pemerintah desa memerlukan NU sebagai sumber

legitimasi sosial dan stabilitas, sementara NU memerlukan negara desa sebagai sumber daya material dan ruang institusional. Relasi ini mencerminkan apa yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni, yaitu kepemimpinan moral dan intelektual yang diperoleh melalui persetujuan, bukan paksaan (Gramsci, 1971).

Kampung NU menjadi medium hegemoni tersebut. Melalui simbol dan praktik keagamaan, relasi kuasa diproduksi dalam bentuk konsensus sosial. Hegemoni ini bekerja efektif karena bersandar pada nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam habitus masyarakat desa. Dengan kata lain, kuasa tidak hadir sebagai dominasi kasar, melainkan sebagai kelaziman yang diterima bersama.

Hal ini menjelaskan mengapa konflik terbuka jarang muncul dalam praktik Kampung NU, meskipun terdapat ketegangan laten. Relasi kuasa yang bekerja bersifat simbolik dan kultural, sehingga resistensi pun cenderung bersifat diam atau tidak terartikulasikan secara eksplisit.

4.5 Kampung NU dan Politik Identitas Lokal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung NU berperan dalam membentuk politik identitas di tingkat desa. Identitas NU tidak hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga identitas sosial yang menentukan posisi warga dalam struktur sosial desa. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Fox (2018) bahwa agama sering kali menjadi basis utama politik identitas di masyarakat dengan tingkat pluralitas internal yang rendah.

Dalam konteks Benelan Lor, politik identitas NU dilembagakan melalui ruang, simbol, dan praktik sosial. Kampung NU menjadi penanda “kami” dan “yang lain”, meskipun batas tersebut tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Identitas NU menjadi identitas dominan yang memonopoli representasi moral desa, sehingga identitas alternatif berada pada posisi subordinat.

Politik identitas ini tidak selalu bermakna eksklusivitas yang keras, tetapi menciptakan hierarki simbolik yang memengaruhi akses terhadap ruang sosial dan kebijakan desa. Dengan demikian, Kampung NU berfungsi sebagai mekanisme klasifikasi sosial yang halus.

4.6 Inklusi Sosial dan Eksklusi Simbolik

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah mengungkap ambivalensi dampak sosial Kampung NU. Di satu sisi, Kampung NU memperkuat solidaritas internal dan kohesi sosial di antara warga yang berbagi identitas keagamaan yang sama. Hal ini mendukung temuan Putnam (2000) tentang modal sosial berbasis komunitas yang dapat memperkuat kepercayaan dan kerja sama.

Namun di sisi lain, penelitian ini menunjukkan adanya eksklusi simbolik terhadap warga yang tidak terlibat aktif dalam struktur NU. Eksklusi ini tidak bersifat administratif, tetapi simbolik dan sosial. Warga tetap menjadi bagian dari desa secara formal, namun mengalami pembatasan partisipasi dalam ruang sosial tertentu.

Eksklusi simbolik ini penting dibahas karena sering kali luput dari perhatian kebijakan publik. Ia bekerja melalui norma, bahasa, dan simbol, sehingga sulit dikenali sebagai bentuk

ketidakadilan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan fragmentasi sosial yang tidak tampak di permukaan.

4.7 Kampung NU dalam Perspektif Relasi Agama dan Negara di Tingkat Lokal

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus relasi agama dan negara di tingkat lokal. Jika selama ini kajian lebih banyak menyoroti relasi agama-negara di tingkat nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi tersebut juga bekerja secara intens di level desa. Negara desa tidak berdiri netral terhadap agama, melainkan bernegosiasi secara aktif dengan aktor keagamaan.

Kampung NU menjadi contoh bagaimana agama dan negara saling menyusupi dalam praktik sehari-hari. Negara memperoleh legitimasi moral, sementara agama memperoleh kekuatan institusional. Relasi ini memperkuat argumen Casanova (2011) tentang hadirnya agama di ruang publik modern, tidak sebagai oposisi terhadap negara, tetapi sebagai mitra yang saling menguntungkan.

4.8 Kontribusi Teoretis dan Implikasi Konseptual

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan konsep arena kuasa Bourdieu dalam konteks desa dan organisasi keagamaan. Kampung NU diposisikan sebagai arena tempat modal simbolik, sosial, dan politik diproduksi dan dipertukarkan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang peran organisasi keagamaan dalam struktur kekuasaan lokal.

Penelitian ini juga mengkritisi pandangan normatif tentang pemberdayaan berbasis agama dengan menunjukkan dimensi kuasa yang menyertainya. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian kritis tentang pembangunan, agama, dan politik lokal.

4.9 Implikasi Praktis bagi Tata Kelola Desa

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya kehati-hatian dalam melembagakan identitas keagamaan dalam kebijakan desa. Kampung NU dapat menjadi sumber kekuatan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan eksklusi simbolik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa program pemberdayaan bersifat inklusif dan tidak mengikatkan akses sosial pada afiliasi identitas tertentu.

Bagi organisasi keagamaan, temuan ini menjadi refleksi bahwa peran sosial-keagamaan yang dijalankan memiliki dampak struktural yang luas. Kesadaran kritis atas posisi dan kuasa yang dimiliki menjadi penting agar pemberdayaan tidak berubah menjadi mekanisme dominasi yang tidak disadari.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Kampung NU di Desa Benelan Lor merupakan arena kuasa yang kompleks. Ia mempertemukan kepentingan pemberdayaan, legitimasi, dan otoritas lokal dalam praktik sosial yang tampak wajar. Dengan membaca Kampung NU melalui lensa teori kuasa, penelitian ini membuka ruang refleksi kritis terhadap peran agama dalam tata kelola desa dan kehidupan sosial masyarakat.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kampung NU di Desa Benelan Lor tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang pemberdayaan keagamaan atau program sosial berbasis komunitas, melainkan sebagai **arena kuasa** yang mempertemukan kepentingan simbolik, sosial, dan politik di tingkat lokal. Kampung NU berfungsi sebagai medium produksi legitimasi, di mana identitas keagamaan NU dikonversi menjadi modal simbolik yang memperkuat otoritas aktor-aktor tertentu dalam struktur sosial desa. Melalui simbol, praktik keagamaan, dan narasi Aswaja, Kampung NU membentuk kerangka kewajaran sosial yang memengaruhi cara warga memahami otoritas dan partisipasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan yang dilekatkan pada Kampung NU memiliki karakter ambivalen. Di satu sisi, ia berkontribusi pada penguatan solidaritas internal, peningkatan partisipasi sosial, dan kohesi komunitas berbasis nilai keagamaan. Di sisi lain, pemberdayaan juga beroperasi sebagai mekanisme kuasa yang halus, karena secara tidak langsung menghasilkan diferensiasi sosial dan potensi eksklusi simbolik terhadap kelompok warga yang berada di luar jejaring NU. Dengan demikian, pemberdayaan dalam konteks ini tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan proses seleksi sosial dan politik identitas.

Relasi antara pemerintah desa dan pengurus Ranting NU di Benelan Lor terbukti bersifat simbiotik dan hegemonik. Pemerintah desa memperoleh legitimasi moral dan stabilitas sosial melalui afiliasi dengan NU, sementara NU mendapatkan akses terhadap sumber daya dan ruang kebijakan desa. Relasi ini menunjukkan bahwa otoritas lokal tidak hanya dibangun melalui mekanisme birokrasi formal, tetapi juga melalui penguasaan simbol dan nilai keagamaan yang diakui secara kultural oleh masyarakat desa.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi pendekatan arena kuasa dalam membaca peran organisasi keagamaan di tingkat desa. Kampung NU diposisikan sebagai ruang relasional yang dinamis, tempat aktor-aktor dengan modal yang berbeda berinteraksi dan bernegosiasi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perspektif kritis terhadap praktik pemberdayaan berbasis agama dengan menempatkannya dalam kerangka relasi kuasa, sehingga memperkaya kajian agama, politik lokal, dan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah desa perlu merancang kebijakan dan program pemberdayaan yang **lebih inklusif**, dengan memastikan bahwa akses terhadap program sosial dan ekonomi tidak bergantung pada afiliasi identitas keagamaan tertentu. Kedua, organisasi keagamaan, termasuk NU, perlu mengembangkan kesadaran reflektif atas posisi dan kuasa simbolik yang dimilikinya, agar praktik pemberdayaan tidak bertransformasi menjadi mekanisme dominasi yang tidak disadari. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antar desa atau lintas organisasi keagamaan guna memperluas pemahaman tentang variasi praktik kuasa berbasis agama di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Kampung NU merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang menyimpan potensi pemberdayaan sekaligus reproduksi kuasa.

Memahami kompleksitas ini menjadi prasyarat penting bagi upaya membangun tata kelola desa yang adil, inklusif, dan sensitif terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2012. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.

Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.

Bush, Robin. 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Casanova, José. 2011. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.

Cornwall, Andrea, dan Karen Brock. 2005. What Do Buzzwords Do for Development Policy? *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 7: 1043–1060.

Dhofier, Zamakhsyari. 2002. Sekolah al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. III, No. 4: 20–55.

Fealy, Greg, dan Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Fox, Jonathan. 2018. *An Introduction to Religion and Politics*. London: Routledge.

Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.

Musafak, Mochamad Abid. 2025. *Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Pengurus Ranting NU Desa Benelan Lor dalam Praktik Pembentukan Kampung NU*. Skripsi. Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Turmudi, Endang. 2006. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra: Australian National University Press.